

**PENGARUH PEMAHAMAN ATAS SISTEM PERPAJAKAN,
TARIF PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

(Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember)

SKRIPSI



Oleh:

ROBI DWI WAHYULIANTO

NIM. 1410421083

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2019

**PENGARUH PEMAHAMAN ATAS SISTEM PERPAJAKAN,
TARIF PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

(Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh:

ROBI DWI WAHYULIANTO

NIM. 1410421083

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi dwi wahyulianto

Nim : 1410421083

Prodi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : “PENGARUH PEMAHAMAN ATAS SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember“; adalah hasil karya sendiri. Kecuali jika dalam beberapa kutipan substansi telah saya sebutkan sumbernya. Belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiat atau jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keaslian, keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah.

Demikian saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia memperoleh sanksi akademik, jika ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan dari pernyataan yang tidak benar tersebut.

Jember, 30 Januari 2019
Yang menyatakan

Robi Dwi Wahyulianto
Nim. 1410421083

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN ATAS SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

(Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember)

Oleh :

Robi Dwi Wahyulianto

Nim. 1410421083



Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : MOH. HALIM. SE. MSA.

Dosen Pembimbing Pendamping : ACHMAD SYAHFRUDIN Z. SE. MM

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ; Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2019

Tempat : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

Tim Penguji

Diyah Probowulan. SE. MM

NPK : 05 03 524

Anggota 1,

Anggota 2,

Moh. Halim. SE.MSA.

NPK : 10 09 558

Ach. Syahfrudin Z. SE. MM

NPK : 12 03 697

Mengesahkan :

Dekan,

Kaprodi,

Arik Susbiyani.SE.MSi.

NPK : 01 09 289

Diyah Probowulan. SE. MM

NPK : 05 03 524

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan keajaiban sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa-Nya tidak akan bisa saya mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Dengan ini kami mengucapkan terimakasih kepada yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Sugito dan Ibu Ma'ani selaku orang tua penulis dan keluarga besar Bapak Sugito, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Moh. Halim, S.E, M.SA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bpk. Ach. Syahfrudin, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan, waktu dan pengarahan hingga dapat tersusunnya skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Diyah Probowulan, SE.MM. selaku Dosen Penguji skripsi yang bersedia memberikan saran, bimbingan dan arahan yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi beserta staff pengajaran yang dengan kebaikan hatinya tidak peduli kapanpun, dimanapun dengan ikhlasnya memberikan waktu, bimbingan dan ilmunya maupun segala petuahnya hingga kami mendapat gelar sarjana.
5. Kepada guru-guru yang telah mengajar saya dari kecil hingga smk, karena dari beliau-beliau pula saya mendapatkan bekal untuk lanjut ke jenjang sarjana
6. Kepada sahabat sekaligus saudara saya Eka bagus yang telah menemani saya dari kecil hingga saya mendapat gelar sarjana, dan juga teman seperjuangan Akuntansi 2014 tanpa terkecuali, juga keluarga besar kosan Ijo Lumut dan seluruh saudara teman atau sahabat dimanapun kalian yang telah mau menyempatkan dan memberikan waktunya untuk sekedar bercanda, belajar, sharing dan memberikan saran dan hujatan pada penulis.
7. Dan terimakasih kepada beliau-beliau yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

ABSTRAK

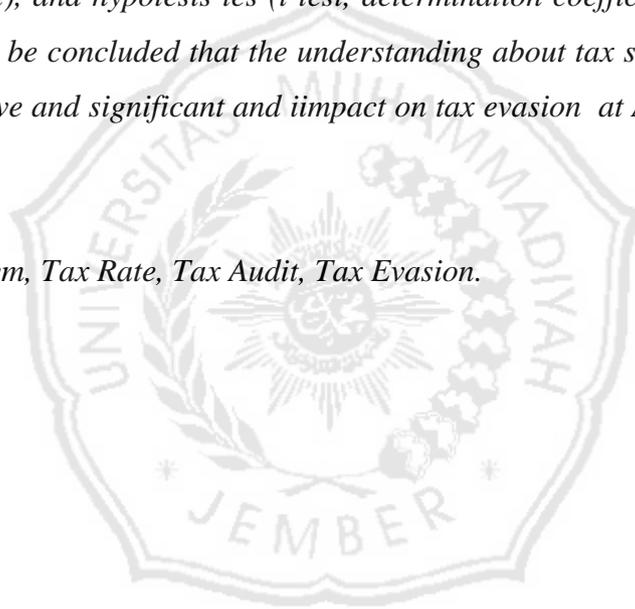
Penelitian mengenai pengaruh pemahaman atas terhadap sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden dengan menggunakan teknik sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan meliputi uji instrumen data, uji validitas, dan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji t, koefisien determinasi). Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Kata kunci : Sistem Pajak, Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

Research on the influence of understanding about tax system, tax rate and tax audit on tax evasion at Ambulu District Office, Jember. The purpose of this study was to understanding about tax system, tax rate and tax audit partially and on Tax evasion at Ambulu District Office, Jember. The samples used in this study were 96 respondents using census techniques. Data collections mhetods used in this study using questionnaires. The analysis includes ata test instruments, test the validity and multiple linear regression analysis, the classical assumption test (multicoloniarity test, normality test, and heteroskidastitiy test), and hypotesis tes (t test, determination coefficient). From the results of data analysis can be concluded that the understanding about tax system, tax rate and tax audit, partial, positive and significant and iimpact on tax evasion at Ambulu District Office, Jember.

Keywords : Tax System, Tax Rate, Tax Audit, Tax Evasion.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember”. Karya tulis ilmiah (skripsi) dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. M. Hazmi, DESS selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Dr. Arik Susbiyani, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Diyah Probowulan, SE.MM. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
4. Bapak Moh. Halim, S.E., M.SA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bpk. Ach. Syahfrudin, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Diyah Probowulan, SE.MM. selaku Dosen Penguji skripsi yang bersedia memberikan saran, bimbingan dan arahan yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Pengajar/dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis, khususnya Staff Pengajar Jurusan Akuntansi.
7. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

8. Bapak Sugito dan Ibu Ma'ani tercinta, yang selalu mendoakan, memberi dukungan serta perhatiannya yang luar biasa.
9. Teman-teman, sahabat dan saudara yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan semua namanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.



Jember, 30 Januari 2019

Penulis

MOTTO

“Nothing last forever, we can change the future”

(Sir Alucard)

“Always be ur self unless u can be batman then always be batman”

(Andy Biersack)

“Apa yang kamu takutkan tidak akan pernah terjadi dan apa yang kamu inginkan tidak semua akan terwujud, Berusahalah !!! ”

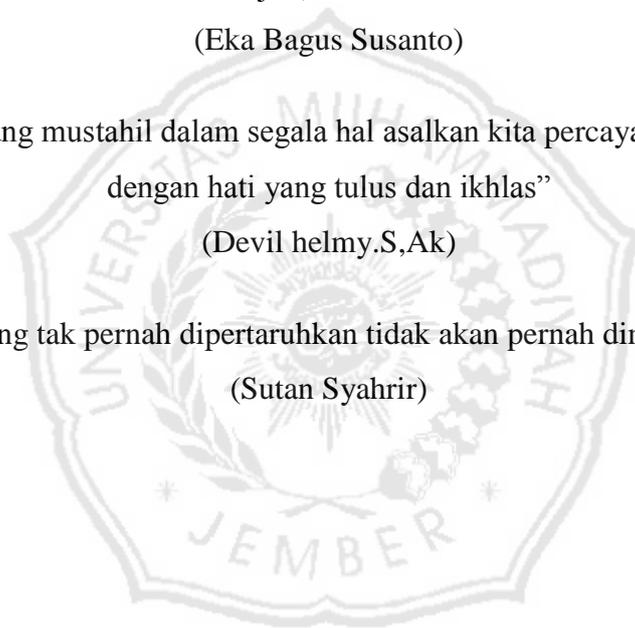
(Eka Bagus Susanto)

“Tidak ada hal yang mustahil dalam segala hal asalkan kita percaya dan mau berusaha dengan hati yang tulus dan ikhlas”

(Devil helmy.S,Ak)

“Hidup yang tak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan ”

(Sutan Syahrir)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori	7
2.1.1 Pemahaman Wajib Pajak	7
2.1.2 Sistem Perpajakan.....	8
2.1.3 Tarif Pajak	9
2.1.4 Pemeriksaan Pajak	11
2.1.4.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	11
2.1.4.2 Sasaran Pemeriksaan	12
2.1.4.3 Wewenang Memeriksa	13

2.1.4.4	Prosedur Pemeriksaan	13
2.1.5	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	13
2.1.6	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
2.3	Kerangka Konseptual	17
2.4	Hipotesis.....	17
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN.....	19
3.1	Jenis Penelitian	19
3.2	Identifikasi Variabel.....	19
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	20
3.4	Sumber Data.....	21
3.5	Teknik Pengambilan Sampel.....	22
3.6	Metode Pengumpulan Data	23
3.7	Uji Kualitas Data.....	24
3.8	Uji Asumsi Klasik	25
3.9	Uji Hipotesis.....	26
3.10	Analisis Regresi Linier Berganda	27
3.11	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	27
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.	28
4.2	Analisis Deskriptif.....	29
4.3	Analisis Data	31
4.3.1	Uji Validitas.....	31
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	33
4.4	Uji Asumsi Klasik.	35
4.4.1	Uji Normalitas.	35

4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	36
4.4.3 Uji Heterosekedastisitas.....	37
4.6 Uji Hipotesis (Uji t).....	39
4.7 Uji Koefisien Determinasi(R^2).....	40
4.8 Pembahasan.....	41
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Grafik Pendapatan Negara	1
Gambar 2. 1	Kerangka Konseptual	17
Gambar 4. 1	Normalitas data	35
Gambar 4. 2	Hasil uji Heterosekedastisitas	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Realisasi Penerimaan Pajak Kab.Jember	4
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4. 1	Jenis Usaha UMKM	29
Tabel 4. 2	Statistik Deskriptif	30
Tabel 4. 3	Uji Validitas	31
Tabel 4. 4	Uji Validitas.....	31
Tabel 4. 5	Uji Validitas.....	32
Tabel 4. 6	Uji Validitas.....	32
Tabel 4. 7	Uji Reliabel	33
Tabel 4. 8	Uji Reliabel	33
Tabel 4. 9	Uji Reliabel	34
Tabel 4. 10	Uji Reliabel	34
Tabel 4. 11	Hasil Uji Multikolinearitas	36
Tabel 4. 12	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
Tabel 4. 13	Hasil Uji t.....	39
Tabel 4. 14	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Uji Validitas	47
Lampiran 2	Uji Reliabilitas	51
Lampiran 3	Uji regresi.....	54
Lampiran 4	r tabel dan t tabel	57
Lampiran 5	Kuesioner Penelitian	60
Lampiran 6	Rekapitulasi Kuesioner	63



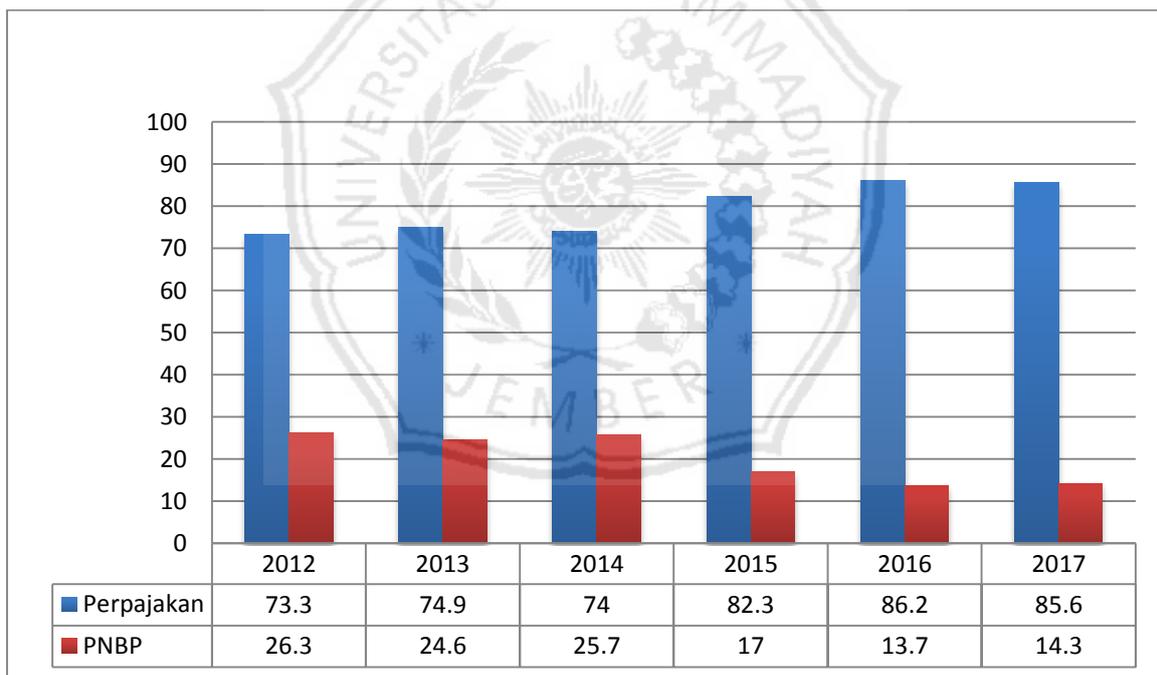
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang juga termasuk kedalam jajaran 20 negara dengan ukuran ekonomi terbesar didunia atau biasa disebut G-20 bersanding dengan negara-negara besar seperti Amerika, Rusia dan negara maju lainnya. Dengan besarnya perekonomian negara pastinya harus di imbangi oleh laju pembangunan agar perekonomian dapat terus tumbuh. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembiayaan untuk menunjang proses pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana dan pemasukan negara untuk melakukan kegiatan pembiayaan terhadap kegiatan pembangunan dan belanja negara di tiap tahunnya.

Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Negara



(Sumber data :Diolah dari www.kemenkeu.go.id).

Dapat dilihat pada grafik diatas (Grafik 1.1) bahwa prosentase penerimaan pajak terhadap APBN 2017 adalah sebesar 85% dari total pendapatan negara, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar 14.3%. menunjukkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah besar dan juga berpengaruh terhadap APBN. Dimana tugas untuk melakukan administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak secara umum ada tiga sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Dimana wajib pajak dituntut untuk berperan, dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terhutang dan menyetorkan kewajiban perpajakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan aparat perpajakan (fiskus) berperan untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan kewajiban dan hak yang dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang cukup. Apabila tingkat pemahaman mereka tersebut masih rendah, Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang nantinya akan mengurangi pendapatannya. Namun, jika wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman yang sangat baik, maka akan terwujud kemandirian dan tingkat kesadaran wajib pajak dengan meningkatnya pula kualitas pelayanan oleh aparat pajak, pelanggaran-pelanggaran perpajakan akan dapat berkurang dan semakin bertambah pula pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Tarif pajak adalah besaran prosentase pembebanan pajak terhadap setiap wajib pajak, dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak di Indonesia tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, di Indonesia tarif pajak untuk wajib pajak pribadi mencapai 30%, sementara 17% untuk Singapura dan 28% di Malaysia. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Berbagai cara dilakukan oleh Wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

Cara yang digunakan oleh Wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Salah satu cara mencegah terjadinya penggelapan pajak adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah dan menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, pemeriksaan pajak dilakukan oleh para aparatur pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Mereka bertugas untuk memeriksa kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan pajak seperti laporan keuangan, SPT dan lainnya dan jika terbukti wajib pajak tersebut melakukan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan maka wajib pajak tersebut dapat dijatuhi sanksi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangatlah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu..

Penggelapan pajak merupakan tindakan melakukan penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan secara ilegal serta melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak biasanya melakukan penggelapan pajak dengan alasan karena pendapatan yang mereka akan berkurang cukup banyak jika membayar pajak, sehingga mereka memiliki upaya untuk melakukan cara agar besarnya pajak yang mereka bayarkan berkurang atau bahkan tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Pajak yang terlalu besar nantinya akan mengurangi pendapatan atau laba dalam jumlah yang lumayan besar juga, sehingga hal ini dianggap kurang menguntungkan bagi wajib pajak. Banyak cara yang digunakan oleh para oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, beberapa modusnya antara lain tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT atau tidak mengisinya dengan benar, tidak menyetor pajak atau melakukan kongkalikong dengan petugas pajak. Tindakan penggelapan pajak tersebut sangatlah merugikan bagi negara. Karena dengan adanya tindakan penggelapan pajak membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tidak hanya gagal memenuhi target saja, tindakan penggelapan pajak juga dapat mengganggu jalannya pembangunan negara karena tidak terealisasinya target dari penerimaan pajak tersebut, dimana dari uang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu dibutuhkan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap penggelapan pajak itu sendiri, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang awam terhadap

penggelapan pajak. Hal ini juga memungkinkan mereka yang masih awam dapat melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan minimnya pemahaman mengenai sistem perpajakan dan hal lainnya.

Setiap tahunnya besarnya penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan. Namun, realisasi tingkat penerimaan pajak belum maksimal seperti yang diharapkan.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kab.Jember

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Kab. Jember					
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	644.47	694.47	838.51	878	953.29
Realisasi	508.65	539.62	711.64	766.49	898.86
Capaian	78.89%	77.67%	84.87%	87.30%	94.29%

Dari tabel diatas (tabel 1.1) dapat dilihat bahwa meskipun besarnya pajak ditaiap tahunnya naik namun terjadi penurunan dalam rasio capaian pajak dari tahun 2013-2016. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*). Salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa mereka telah bekerja keras untuk menghasilkan uang tetapi dengan begitu saja dipungut oleh negara, hal ini yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Hal ini biasanya dilakukan karena semakin tingginya penghasilan yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan dan dengan pajak yang tinggi tersebut penghasilan yang didapatkan akan berkurang, sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaporan pajaknya.

Dalam penelitian Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015) yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) oleh Wajib pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). Dimana meneliti pengaruh sistem pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Dalam penelitian tersebut secara parsial sistem pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan menunjukkan arah hubungan yang positif, demikian pula dengan variabel pemeriksaan pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Secara parsial, sistem pajak dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Didukung juga dalam penelitian Fauzi Achmad Mustofa, yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Dimana Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya rumusan masalah untuk dapat mempermudah penjelasan. Di penelitian ini penulis membuat batasan dalam ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah merupakan sebuah dampak yang akan muncul dari dilakukannya sebuah penelitian baik untuk penulis maupun bagi pihak lain, yang secara umum dibedakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan berupa ide, gagasan untuk dapat mengembangkan teori yang sudah ada dan dapat menambah pengetahuan berkaitan mengenai ilmu ekonomi akuntansi maupun ilmu perpajakan, khususnya menyangkut tentang pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini merupakan petualangan bagi penulis dimana dapat menambah pengetahuan dan memperoleh ilham tentang bagaimana diterapkannya teori-teori yang sudah dipelajari di dalam kelas perkuliahan, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dibidang perpajakan maupun mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Bagi Instansi.

Hasil penelitian ini dapat memberikan donasi pemikiran dan diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam memberikan pembinaan, pelayanan, sistem, pemeriksaan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang nantinya juga berdampak terhadap pembangunan negara.

c. Bagi Pihak Lain.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau perbandingan yang dapat mencerdaskan maupun menambah pengetahuan bagi mereka yang membaca.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua perihal mengenai perpajakan yang dimengerti secara baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak seharusnya memiliki pemahaman mengenai perpajakan, khususnya mengenai pentingnya pajak bagi pembiayaan negara. Karena tindakan wajib pajak tersebut dilandasi atas pandangan mereka mengenai pajak. Selanjutnya, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perpajakannya. Adanya pemahaman mengenai perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajakkannya menurut Putri dalam Putut (2017:19). Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak tahu tentang perpajakan dan mengamalkan pengetahuan tersebut dalam melaksanakan pembayaran pajak. Panca Hardiningsih dalam Putut (2017:19) menyatakan bila dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan baik secara formal maupun non formal member pengaruh positif kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Rendahnya penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Putut (2017:19) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini ialah *self assessment system* yakni pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab pada setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu contohnya dimasukkannya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*Reguler*).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan seperti yang telah dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.2 Sistem Perpajakan

Menurut Rahaman dalam Riski (2015:3), Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan wujud dari pengabdian serta peranwajib pajak untuk secara langsung dan bersama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara.

Masyarakat atau wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga dengan sistem ini administrasi perpajakan diharapkan mampu dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat atau wajib pajak (Siahaan, 2010).

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009) sebagai berikut:

1. *Official Assessment System.*

Sistem ini adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System.*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.

3. *Withholding System.*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem pajak adalah cara-cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak yang sistemnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku, dimana seorang wajib pajak dapat menghitung sendiri, menggunakan jasa orang lain ataupun dengan bantuan dari petugas pajak untuk melakukan perhitungan terhadap beban pajak yang akan dibayarkannya nanti kepada pemerintah.

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya jumlah perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak tergolong kedalam ketentuan materil di hukum pajak berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak. Tarif pajak digunakan untuk mengukur jumlah pajak terutang, tanpa mengesampingkan fungsi hukum pajak mengenai keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Indikator penelitian ini adalah kemampuan dalam membayar pajak dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia menurut Permatasari dalam Galih (2017:4).

Menurut Simanjuntak dalam Fauzi & Mirza (2017:4) secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan.

Karena besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:9), tarif pajak dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Tarif sebanding / proporsional.
Tarif berupa presentase yang tetap, berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap.
Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif.
Presentase tarif yang dikenakan akan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif.
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin membesar.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan tarif pajak adalah prosentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak, dimana setiap wajib pajak dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 tarif pajak UMKM sebesar 0,5% tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, (Sumber dari <http://.Pajak.go.id>).

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo (2009:22) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo dalam Raden Devi Ardian dan Dudi Pratomo (2015:4) pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data secara objektif dan proporsional dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan pemeriksaan pajak ini juga dapat meminimalisir penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Jadi pemeriksaan pajak dapat dikatakan pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, dimana pemeriksa pajak memeriksa dokumen-dokumen serta bukti yang berkaitan dengan pelaporan pajak seperti laporan keuangan dan bukti lainnya.

2.1.4.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:51) adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan lain dari pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna menyusun nomor penghitungan penghasilan netto.
- f. Pencocokan data atau alat keterangan.
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.
- h. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Sasaran Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan seorang pemeriksa biasanya melakukan analisa hal-hal apa yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan pemeriksaan. Menurut Mardiasmo (2009:52) yang menjadi sasaran dalam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.4.3 Wewenang Memeriksa

Menurut Mardiasmo (2009:52) Direktorat Jendral Perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wewenang tersebut antara lain:

1. Melihat ataupun meminjam catatan, buku dan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berkaitan dengan pencatatan penghasilan wajib pajak.
2. Memasuki dan memeriksa ruangan tempat yang memberi informasi mengenai wajib pajak.
3. Meminta keterangan lisan dari wajib pajak dan pihak lain yang berhubungan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Meminta bukti atau keterangan dari pihak ketiga jika diperlukan ataupun berhubungan dengan wajib pajak.

2.1.4.4 Prosedur Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2009:52) prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak.
2. Wajib pajak harus memperlihatkan dokumen-dokumen yang berhubungan penghasilan, kegiatan usaha dan pekerjaan bebas wajib pajak.
3. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu member bantuan kelancaran pemeriksaan.
4. Member keterangan yang diperlukan dan meniadakan kewajiban merahasiakan apapun.

2.1.5 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell Suhari (2017:5), penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam hal ini tentunya bersifat ilegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dan dapat mendatangkan marabahaya bagi wajib pajak dikemudian hari.

Pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Wati (2015:6) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, mengurangkan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau

meloloskan diri untuk tidak membayarkan pajak sebagaimana yang telah terutang menurut peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2009:9) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang diterima dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus beban pajak dengan cara atau tindakan ilegal seperti tidak melaporkan SPT, melakukan manipulasi terhadap perhitungan ataupun laporan keuangan serta tindakan-tindakan lainnya yang merupakan tindak pidana karena melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

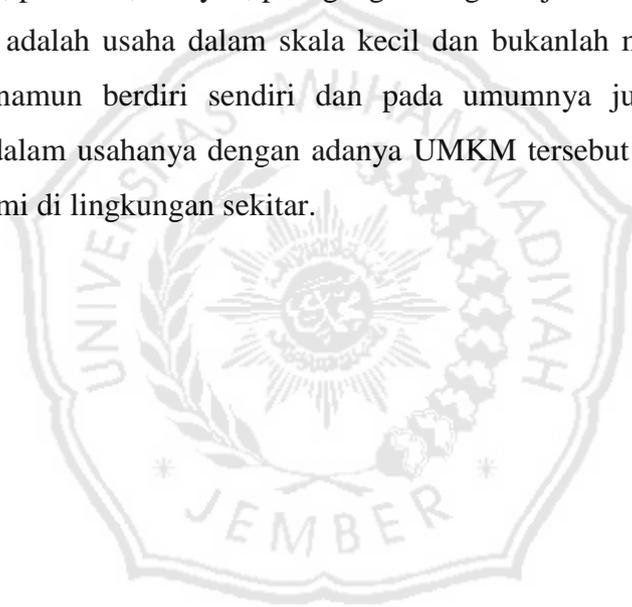
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah :

1. Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Jadi UMKM adalah usaha dalam skala kecil dan bukanlah merupakan cabang dari sebuah perusahaan namun berdiri sendiri dan pada umumnya jumlah karyawan tidak melebihi 100 orang dalam usahanya dengan adanya UMKM tersebut mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar.



2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

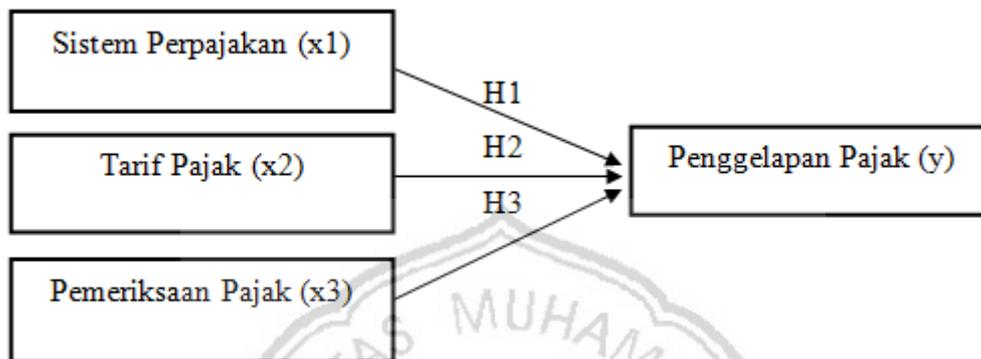
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Kesimpulan
1	Fauzi Achmad Mustofa	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan, Kepatuhan Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan berpengaruh secara signifikan Kepatuhan Wajib Pajak
2	Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015)	Pengaruh Sistem Perajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak	Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak , Tax Evasion	KPP Pratama wilayah Kota Bandung	Sistem Pajak dan pemeriksaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tax evasion
3	Putut Priambodo (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kab. Purworejo	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan Kepatuhan Wajib Pajak
4	Rizky Oktaviani (2015)	Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya Tax Evasion	Keadilan Tarif Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak, Tax Evasion	UMKM Soreang-Bandung	Keadilan Tarif Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Evasion
5	Galih Ginanjar Sasmito (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	Tarif Pajak, Sistem Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Penggelapan Pajak	Kantor Wilayah DJP Jatim I dan II	Tarif Pajak, Sistem Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Penggelapan Pajak
6	A.A Mirah Pradnya Paramita I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Sistem Perpajakan, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak. Penggelapan Pajak	(KPP) Pratama Badung Utara	Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

2.3 Kerangka Konseptual

Teori-teori yang telah dikumpulkan pada landasan teori dan telah diuraikan, harus dapat menghasilkan beberapa konsep. Hubungan antara konsep-konsep yang telah didasarkan atas teori-teori tersebut adalah kerangka konseptual. Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.



2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah digambarkan diatas maka hipotesis dari penelitian diatas adalah :

1. Pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem pajak adalah cara-cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak yang sistemnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri, dengan bantuan pihak ketiga atau dilakukan oleh aparat pajak. Marzina.,et.,al dalam Kuraesin (2013) yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk patuh dalam hal ini mampu dalam menerapkan *Self Assessment System* yang didalamnya terdapat aspek untuk membayar jumlah wajib pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur dalam melaporkan dan akurat dalam menghitung. Jadi dapat disimpulkan bila pemahaman sistem perpajakan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan

H1 : Pemahaman sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Pemahaman Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tarif pajak adalah prosentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Menurut Permatasari dalam Galih (2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian terhadap tarif pajak yang ada. Peningkatan tarif pajak oleh pemerintah bertujuan untuk menambah pemasukan pendapatan untuk negara, namun ternyata fakta dilapangan justru sebaliknya. Karena dengan semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan, maka mengakibatkan semakin besar juga tingkat penggelapan pajak. Kejadian ini mengakibatkan pendapatan yang seharusnya diterima negara akan semakin berkurang. Dari penelitian Wati Aris Astuti (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

H2 : Pemahaman Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Pemahaman Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pemeriksaan pajak dapat dikatakan pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Pemeriksaan didalamnya terdapat serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah suatu data, keterangan ataupun bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Raden dan Dudi (2015:3) Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan bertujuan agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak, sehingga mempengaruhi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam penelitian Wati Aris Astuti kualitas pemeriksaan terbukti berpengaruh terhadap upaya terjadinya tax evasion, masalah terjadinya tax evasion terjadi karena adanya pemeriksaan yang kurang baik. Dan dalam penelitian Raden Devi Ardian dan Dudi Pratomo (2015) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

H3 : Pemahaman Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif adalah data numerik berupa simbol angka maupun bilangan yang menunjukkan hasil dari pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam keperluan penelitian. Berdasarkan data tersebut perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari penelitian.

3.2 Identifikasi Variabel

Variabel penelitian adalah nilai atau sifat atau atribut dari obyek, orang maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independen*).

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013).

Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah :

- a. Sistem Perpajakan (X1).
- b. Tarif Pajak (X2).
- c. Pemeriksaan Pajak (X3).

2. Variabel Terikat (*Dependen*).

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena munculnya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*tax evasion*).

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjabaran suatu variabel ke dalam indicator-indikator. Dengan definisi operasional variabel yang digunakan dalam suatu penelitian maka akan mempermudah pengukuran

1. Sistem Perpajakan.

Sistem perpajakan (X1) adalah cara-cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak yang sistemnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment system*), dengan bantuan pihak ketiga (*withholding system*) atau perhitungan dan penetapan besarnya pajak dilakukan oleh aparat pajak (*official assessment system*). Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih baik menurut Mardiasmo (2009), adapun indikator dari sistem pajak:

- a. Perhitungan pajak terhutang.
- b. Kesadaran wajib pajak.
- c. Kepatuhan wajib pajak.
- d. Peranan fiskus.

2. Tarif Pajak.

Tarif pajak (X2) menurut Mardiasmo (2009) adalah prosentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Tarif pajak digunakan untuk mengukur jumlah pajak terutang yang besarnya tergantung pada obyek pajak, pendapatan wajib pajak dan kriteria lainnya. Dimana di Indonesia terdapat beberapa tarif pajak, seperti tarif sebanding (*proporsional*), tarif tetap, tarif progresif dan tarif degressif. Jadi setiap wajib pajak dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. adapun indikator dari tarif pajak:

- a. Prosentase tarif pajak.
- b. Kesadaran wajib pajak.
- c. Penghasilan wajib pajak.
- d. Keadilan tarif pajak.

3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak (X3) menurut Mardiasmo (2009) dapat dikatakan pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Pemeriksaan didalamnya terdapat serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah suatu data, keterangan ataupun bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun indikator dari pemeriksaan pajak:

- a. Pedoman pemeriksaan.
- b. Kualitas pemeriksaan.
- c. Kelengkapan data/bukti.

4. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Penggelapan pajak (Y) Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell Suhari (2017:5) adalah merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus beban pajak dan merupakan tindak pidana karena melanggar undang-undang perpajakan. Biasanya para wajib pajak melakukan tindakan tersebut dengan modus tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT atau tidak mengisinya dengan benar, tidak menyetor pajak atau melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Adapun indikator dari penggelapan pajak (*tax evasion*):

- a. Tidak menyampaikan SPT
- b. Mengisi SPT dengan tidak benar.
- c. Tidak menyetor pajak.
- d. Berusaha menyuap petugas pajak.

3.4 Sumber Data

Sumber data ialah merupakan informasi darimana dan dengan menggunakan cara apa sebuah data pada penelitian diperoleh, dan pada penelitian ini terdapat beberapa data, antara lain :

1. Data Primer.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diedarkan pada Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada pada Kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik dan pengambilan sampel

1. Populasi.

Menurut Sugiyono (2013:115) mengatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah UMKM di Kecamatan Ambulu. Dengan jumlah populasi sebanyak 434 orang terdiri dari pedagang toko kelontong, toko pertanian, bengkel, toko baju, toko perhiasan dan usaha jasa lainnya untuk pengisian angket.

2. Sampel.

Menurut Sugiyono (2013:116) menyatakan Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus dari Slovin dalam Umar (2002:141) dikarenakan rumus slovin adalah rumus yang mudh dan praktis untuk menentukan sample minimal dalam penelitian.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Sampel.

N = Populasi.

e = Taraf kesalahan atau nilai kritis (5%).

Sesuai dengan rumus di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{2631}{1 + 2631(0.5)^2}$$

$$n = 96$$

Berdasarkan penghitungan tersebut maka sampel yang diambil dibulatkan menjadi sebanyak 96 orang.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya. Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari angket-angket tersebut yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Berdasarkan skala likert, sebagai berikut :

- a. Sangat setuju diberi skor 5.
- b. Setuju diberi skor 4.

- c. Ragu-ragu netral diberi skor 3.
 - d. Tidak setuju diberi skor 2.
 - e. Sangat tidak setuju diberi skor 1.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut penulis peroleh dengan cara menelaah berbagai macam bacaan seperti buku, jurnal dan bahan bacaan relevan lainnya.

3.7 Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket instrument-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

1. Uji Validitas.

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tes tersebut menjalankan fungsi pengukurannya atau memberikan hasil ukuran sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes atau penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2013:172) menyatakan bahwa valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode Sugiyono (2013:188) menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya pengukuran validitas dilakukan dengan menguji taraf signifikansi *product moment pearson's*. Suatu variabel dikatakan valid, apabila r hitung, item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r table.

2. Uji Reliabilitas.

Pengujian terhadap reliabilitas atau keandalan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen (kuesioner) yang reliable berarti mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui ketetapan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai tingkat reabilitas yang tinggi bila alat ukur tersebut dapat diandalkan dalam arti pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan *Cronbach's Alpha* (α).

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi

1. Uji Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas.

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadinya hubungan antar variabel independen dan hubungan yang terjadi cukup besar. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation factor* (VIF). Model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas jika VIF tidak lebih dari 10 dan

nilai. *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$, Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

3. Uji Heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2005: 105).

3.9 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dari percobaan terkontrol maupun tidak terkontrol. Dalam statistik hasil dapat dikatakan signifikan apabila kejadian tersebut tidak mungkin disebabkan karena kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang ditentukan sebelumnya.

1. Uji t.

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dilihat pada tabel *coefficients*, dengan kriteria :

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang artinya bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya

3.10 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak (X1), tarif pajak (X2) dan pemeriksaan pajak (X3) terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y). Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
a	= Konstanta.
X ₁	= pemahaman sistem perpajakan.
X ₂	= tarif pajak.
X ₃	= pemeriksaan pajak.
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien regresi untuk X ₁ , X ₂ , X ₃ .
e	= <i>error term</i> (kesalahan pengganggu).

3.11 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menevariasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember beralamatkan di Jl. Jawa No.115, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Jember, demi mengembangkan potensi pendapatan dan kreativitas masyarakat di Kabupaten Jember. Seperti yang kita ketahui Indonesia sedang gencar-gencarnya menggenjot sektor pembangunan guna memicu pertumbuhan perekonomian, dimana sektor kelas menengah kebawah menjadi target untuk pengembangan dan merupakan pasar yang sangat potensial. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan untuk dapat melakukan edukasi dan pendampingan bagi usaha kecil menengah dimana mereka ini diharapkan dapat berkembang dan mampu menghasilkan produk berkualitas saing dan mampu menaikkan taraf hidup serta mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Sedangkan objek penelitian adalah UMKM di Kecamatan Ambulu dimana pada wilayah tersebut merupakan salah satu pasar potensial untuk mendirikan berbagai usaha dikarenakan banyaknya sektor pariwisata yang lumayan terkenal di daerah tapal kuda seperti Pantai Watu Ulo, Pantai Payangan dan Pantai Papuma, dimana kawasan tersebut merupakan lahan basah bagi usaha perdagangan maupun jasa. Selain dalam segi pariwisata di Kecamatan Ambulu yang kebanyakan petani juga didominasi usaha-usaha produk pertanian serta kebutuhan pertanian, serta diikuti usaha jasa lainnya. Kecamatan Ambulu sendiri memiliki beberapa desa antara lain :

1. Andongsari.
2. Karang anyar.
3. Pontang.
4. Sabrang.
5. Sumberan.
6. Sumberejo.
7. Tegalsari

4.2 Analisis Deskriptif

Objek dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dimana terdapat 2.631 UMKM yang tercatat melakukan pembayaran pajak, Sedangkan dalam menentukan responden pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus dari Slovin, dimana perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{2631}{1+2631(0.5)^2} = 96 \text{ UMKM}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut maka sampel yang diambil untuk dilakukan penelitian adalah menjadi sebanyak 96 UMKM di Kecamatan Ambulu. Dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 96 dan sebanyak 5 kuesioner ditolak. Jadi ada 91 orang yang mengisi kuesioner tersebut, dengan rincian responden penelitian ini terdiri dari 54 laki-laki dan 37 perempuan. Dengan beberapa jenis usaha yang diteliti, antara lain :

Tabel 4. 1 Jenis Usaha UMKM.

No	Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase
1	Usaha perdagangan	60	65,9 %
2	Usaha industri	22	24,1 %
3	Usaha jasa	9	10 %

Sumber: Lampiran , data diolah

Dapat dilihat dari tabel 4.1 diatas jenis usaha perdagangan mendominasi UMKM di Kecamatan Ambulu yaitu sebesar 65,9 % dan usaha industri sebesar 24,1% kemudian diikuti usaha jasa sebesar 10%. Usaha dalam bentuk perdagangan mendominasi jenis-jenis UMKM di Kecamatan Ambulu dikarenakan mayoritas penduduknya merupakan petani sehingga kebanyakan mereka menjual produk-produk hasil pertanian dan kebutuhan pertanian lainnya, selain itu terdapat beberapa wisata seperti Pantai Watu Ulo, Pantai Payangan dan Pantai Papuma yang juga menjadi lahan basah bagi sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Ambulu.

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif.

Varibel	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Pemahaman Pemeriksaan pajak (X1)	16	25	20.84	1.916
Tarif Pajak (X2)	13	25	20.99	2.359
Pemeriksaan Pajak (X3)	13	25	21.19	2.304
Penggelapan pajak (Y)	14	25	21.24	2.051

Sumber: Lampiran 2, data diolah.

Dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas jika hasil mean pada keseluruhan baik variabel x maupun variabel y lebih besar daripada hasil standar deviasi masing-masing variabel. Hal ini menunjukkan hasil yang baik, karean standar deviasi adalah cerminan penyimpangan yang tinggi, sehingga dapat menunjukkan hasil yang normal dan tidak menimbulkan bias.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana r_{tabel} adalah sebesar 2,039 berdasarkan lampiran 4, Dan berikut ini hasil dari uji validitas :

1. Variabel (X1), Sistem Perpajakan.

Tabel 4. 3 Uji Validitas.

X1.4	Pearson Correlation	.707**	.406**	.164	1	.214*	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.120		.042	.000
	N	91	91	91	91	91	91

Sumber: Lampiran 1, data diolah.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel X1 adalah valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dan dimana variabel (X1.4) atau item pertanyaan kuesioner variabel pemahaman sistem perpajakan ke 4, yang menunjukkan tingkat validitas paling tinggi dari item variabel X1 yang lain, dengan nilai r_{hitung} 0.823.

2. Variabel (X2), Tarif Pajak.

Tabel 4. 4 Uji Validitas.

X2.2	Pearson Correlation	.355**	1	.761**	.290**	.390**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.005	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91

Sumber: Lampiran 1, data diolah.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel X2 adalah valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dan dimana variabel (X2.2) atau item pertanyaan kuesioner variabel tarif pajak ke 2, yang menunjukkan tingkat validitas paling tinggi dari item variabel X2 yang lain, dengan nilai r_{hitung} 0,828.

3. Variabel (X3), Pemeriksaan Pajak.

Tabel 4. 5 Uji Validitas.

X3.5	Pearson Correlation	.355**	.649**	.613**	.305**	1	.867**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.003		.000
	N	91	91	91	91	91	91

Sumber: Lampiran 1, data diolah.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel X3 adalah valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dan dimana variabel (X3.5) atau item pertanyaan kuesioner variabel pemeriksaan pajak ke 5, yang menunjukkan tingkat validitas paling tinggi dari item variabel X3 yang lain, dengan nilai r hitung 0,867 dan nilai signifikasi 0,000.

4. Variabel (Y), Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Tabel 4. 6 Uji Validitas.

Y5	Pearson Correlation	.241*	.254*	.171	.672**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.022	.015	.106	.000		.000
	N	91	91	91	91	91	91

Sumber: Lampiran 1, data diolah.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel Y adalah valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dan dimana variabel (Y.5) atau item pertanyaan kuesioner variabel pemeriksaan pajak ke 5, yang menunjukkan tingkat validitas paling tinggi dari item variabel Y yang lain dengan nilai r hitung 0,780.

4.3.2 Uji Reliabilitas.

Pengujian terhadap reliabilitas atau keandalan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila variabel tersebut memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,600. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel ada pada tabel berikut ini:

1. Variabel (X1), Sistem Perpajakan.

Tabel 4. 7 Uji Reliabel

Cronbach's Alpha	N of Items
.754	6

Sumber: Lampiran 2, data diolah.

Dapat dilihat dari hasil uji reliabilitas variabel X1 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang terlihat pada nilai *cronchbach's alpha* diatas sebesar 0,754 berarti menunjukkan bahwa X1 adalah reliable dikatakan reliabel karena > 0,600.

2. Variabel (X2), Tarif Pajak.

Tabel 4. 8 Uji Reliabel.

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	6

Sumber: Lampiran 2, data diolah.

Dapat dilihat dari hasil uji reliabilitas variabel X2 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang terlihat pada nilai *cronchbach's alpha* diatas sebesar 0,772 berarti menunjukkan bahwa X2 adalah reliable dikatakan reliabel karena > 0,600.

3. Variabel (X3), Pemeriksaan Pajak.

Tabel 4. 9 Uji Reliabel.

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	6

Sumber: Lampiran 2, data diolah.

Dapat dilihat dari hasil uji reliabilitas variabel X3 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang terlihat pada nilai *cronchbach's alpha* diatas sebesar 0,773 berarti menunjukkan bahwa X3 adalah reliable dikatakan reliabel karena $> 0,600$.

4. Variabel (Y), Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Tabel 4. 10 Uji Reliabel.

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

Sumber: Lampiran 2, data diolah

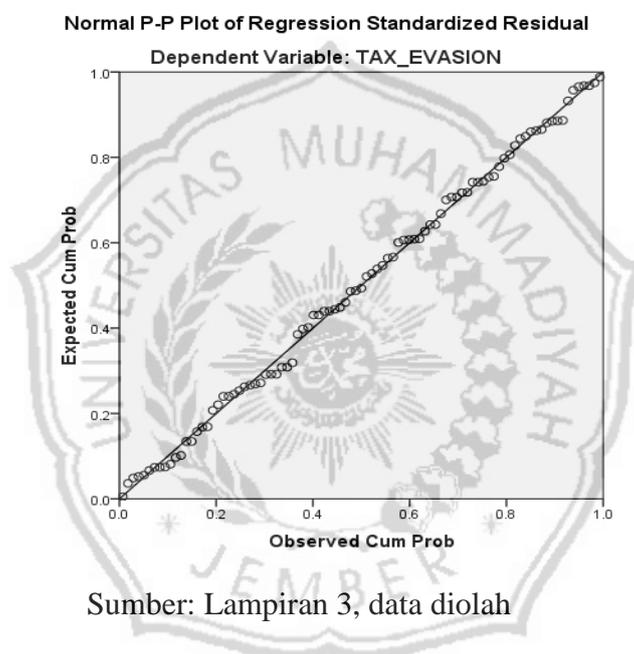
Dapat dilihat dari hasil uji reliabilitas variabel Y menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang terlihat pada nilai *cronchbach's alpha* diatas sebesar 0,773 berarti menunjukkan bahwa Y adalah reliable dikatakan reliabel karena $> 0,600$.

4.4 Uji Asumsi Klasik.

4.4.1 Uji Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Ketentuan dari uji normalitas adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4. 1 Normalitas data.



Sumber: Lampiran 3, data diolah

Setelah dilakukan pengujian ternyata semua data terdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinieritas.

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model regresi. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1 atau 10%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2009).

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.076	1.541		.050	.961		
X1	.422	.069	.394	6.123	.000	.795	1.257
X2	.131	.056	.150	2.337	.022	.797	1.254
X3	.455	.063	.511	7.226	.000	.660	1.516

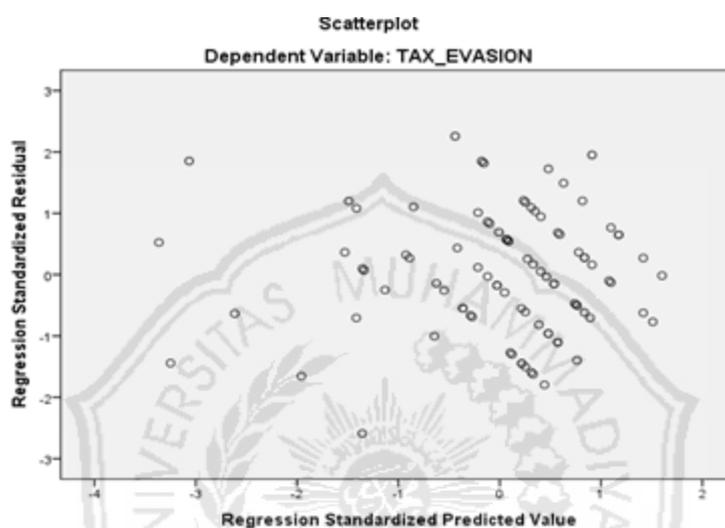
Sumber: Lampiran 3, data diolah

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat jika nilai toleransi pada keseluruhan variabel berada diatas 0,1 atau 10% dan nilai VIF berada dibawah 10 jadi dapat disimpulkan bahwa model linier berganda tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4. 2 Hasil uji Heteroskedastisitas.



Sumber: Lampiran 3, data diolah

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, ternyata titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolenieritas dan terbebas dari heteroskedastisitas. Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh

secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.076	1.541		.050	.961		
X1	.422	.069	.394	6.123	.000	.795	1.257
X2	.131	.056	.150	2.337	.022	.797	1.254
X3	.455	.063	.511	7.226	.000	.660	1.516

Sumber: Lampiran 3, data diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 0,76 + 0,422 X_1 + 0,131 X_2 + 0,455 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

X1 = Sistem Perpajakan.

X2 = Tarif Pajak.

X3 = Pemeriksaan Pajak.

e = Error

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 0,76, artinya apabila nilai variabel independen bernilai nol maka nilai variabel dependen penggelapan pajak bernilai sebesar 0,76.
2. Nilai koefisien regresi sistem perpajakan sebesar 0,422 mempunyai arti bahwa variabel sistem perpajakan mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel penggelapan pajak sebesar 0,422 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.
3. Nilai koefisien regresi tarif pajak sebesar 0,131 mempunyai arti bahwa variabel tarif pajak mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel dependen penggelapan pajak sebesar 0,131 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.

4. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0,455 mempunyai arti bahwa variabel pemeriksaan pajak mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel dependen penggelapan pajak sebesar 0,455 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.

4.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat signifikansi yang dihasilkan, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,005 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, serta juga dapat dilihat pada hasil t hitung dalam tabel jika hasilnya lebih besar dari t tabel maka hipotesis dapat diterima.

Tabel 4. 13 Hasil Uji t.

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	.076	1.541		.050	.961			
X1	.422	.069	.394	6.123	.000	.795	1.257	
X2	.131	.056	.150	2.337	.022	.797	1.254	
X3	.455	.063	.511	7.226	.000	.660	1.516	

Sumber: Lampiran 3, data diolah

Dari tabel 4.8 di atas diketahui perbandingan antara taraf signifikansi dengan signifikansi tabel dan t hitung dengan t tabel (lampiran. 4) adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji mengenai sistem perpajakan mempunyai nilai $t_{hitung} (6,123) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Hasil uji tarif pajak mempunyai nilai $t_{hitung} (2,337) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Hasil uji pemeriksaan pajak mempunyai nilai $t_{hitung} (7,226) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.7 Uji Koefisien Determinasi(R^2)

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845 ^a	.713	.703	1.117

Sumber: Lampiran 3, data diolah

Dari tabel 4.15, diketahui hasil perhitungan regresi bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.703. Hal ini berarti 70,3 % variasi variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dipilih sedangkan sisanya sebesar 0,297% atau 29,7 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan.

4.8.1 Sistem Perpajakan.

Hasil uji sistem perpajakan mempunyai $t_{hitung} (6,123) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem pajak merupakan cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak yang sistemnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri, dengan bantuan pihak ketiga atau dilakukan oleh aparat pajak. Dengan dibarengi adanya pemahaman mengenai sistem tersebut, maka dapat dipastikan sistem akan berjalan dengan baik dan lancar. Jika tingkat pemahaman pada mereka tersebut masih tergolong rendah, Hal tersebut mungkin akan dapat memunculkan beberapa masalah dalam pajak, beberapa diantaranya yaitu merupakan tindakan penggelapan dalam pajak. Marzina dalam Kuraesin (2013) yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk patuh dalam hal ini mampu dalam menerapkan *Self Assessment System* yang didalamnya terdapat aspek untuk membayar jumlah wajib pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur dalam melaporkan dan akurat dalam menghitung. Jadi dapat disimpulkan bila pemahaman sistem perpajakan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan.

4.8.2 Tarif Pajak.

Hasil uji tarif pajak mempunyai nilai $t_{hitung} (2,337) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Tarif pajak adalah prosentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Pada saat ini terdapat kasus dimana wajib pajak memiliki keinginan untuk mengamankan kekayaannya dari pajak sebanyak mungkin dengan melakukan berbagai macam cara, dengan alibi berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun mengamankan harta kekayaan yang diperolehnya. Berbagai macam cara dilakukan setiap wajib pajak dalam usaha untuk menghindari kewajibannya, baik dengan menggunakan cara yang ilegal dan legal dalam undang-undang perpajakan salah satunya adalah tindakan penggelapan pajak. Menurut Permatasari dalam Galih (2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian terhadap tarif pajak yang ada. Peningkatan tarif pajak oleh pemerintah

bertujuan untuk menambah pemasukan pendapatan untuk negara, namun ternyata fakta dilapangan justru sebaliknya. Karena dengan semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan, maka mengakibatkan semakin besar juga tingkat penggelapan pajak. Kejadian ini mengakibatkan pendapatan yang seharusnya diterima negara akan semakin berkurang.

4.8.3 Pemeriksaan Pajak.

Hasil uji pemeriksaan pajak mempunyai nilai $t_{hitung} (7,226) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Pemeriksaan didalamnya terdapat serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah suatu data, keterangan ataupun bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari variabel independen lain pemeriksaan pajak menunjukkan pengaruh yang cukup besar dimana dengan adanya pemeriksaan tersebut dapat diungkap adan tidaknya suatu tindakan pelanggaran oleh seorang wajib pajak, jadi pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi dan menekan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Raden dan Dudi (2015:3) Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan bertujuan agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak, sehingga mempengaruhi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Pajak merupakan suatu kewajiban dimana seorang warga negara menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara dari berbagai sektor yang nantinya dari pembangunan tersebut dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya pembangunan baik dari SDM maupun infrastruktur maka akan tercipta perkembangan khususnya dari segi ekonomi, dimana dapat diketahui di Indonesia yang didominasi oleh golongan menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah melirik sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diyakini memiliki kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat yang nantinya juga berimbas pada sektor penerimaan negara khususnya pajak pada sektor UMKM.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman sistem perpajakan, tarif pajak dan pemeriksaan pajak mempengaruhi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dan variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling besar diantara variabel independen lainnya. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji sistem perpajakan mempunyai nilai $t_{hitung} (6,123) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Hasil uji tarif pajak mempunyai nilai $t_{hitung} (2,337) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Hasil uji pemeriksaan pajak mempunyai nilai $t_{hitung} (7,226) > t_{tabel} (1.6618)$ yang berarti bahwa hipotesis pemahaman pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dapat dilihat dari hasil pengujian diatas dimana variabel pemeriksaan pajak dengan nilai $t_{hitung} (7,226) > t_{tabel} (1.6618)$. jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*), karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka seluruh kecurangan-kecurangan akan terdeteksi sehingga dapat mengurangi kecurangan dan juga dapat menekan terjadinya penggelapan pajak yang dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

5.2 Saran

1. Bagi Instansi Terkait

Pemerintah pada khususnya di daerah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan melakukan upaya peningkatan pengetahuan serta pemahaman pajak dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat dalam bentuk apapun, khususnya mereka yang ada di pedesaan dan diharapkan pula pemerintah meningkatkan keadilan dalam penentuan besarnya tarif pajak, serta meningkatkan pengawasan dan kualitas pemeriksaan. Dan diharapkan pula agar uang pajak yang terkumpul dapat digunakan sebaik-baiknya.

2. Bagi Wajib Pajak Keseluruhan.

Diharapkan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya mengenai perpajakan, serta melakukan setiap kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar nantinya menjadi contoh dan pendorong bagi wajib pajak lain untuk melakukan pemenuhan kewajiban dengan baik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan peneliti berikutnya untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menambah jumlah responden yang akan diteliti atau menggunakan objek lainnya. Ataupun adanya topik-topik lain yang nantinya penelitian tersebut mampu memberi sumbangan ide dan gagasan terhadap perubahan dan kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R .D & Pratomo, D. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). Bandung. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.
- Astuti. W, A. 2015. Pengaruh Keadilan Tarif pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Meminimalisasi *Tax Evasion*.
- Fauzi & Mirza. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Malang. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ghazali, Imam. 2013. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Progam AMOS 16.0. Semarang. Bagian Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- [http:// www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id) (Diunduh tanggal 27 Mei 2018, 19:00).
- [http:// www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Diunduh tanggal 27 Mei 2018, 21:00).
- [http:// www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) (Diunduh tanggal 28 Mei 2018, 20:00).
- <http://www.pajak.go.id> (Diunduh tanggal 28 Mei 2018, 19:00).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994.
- Kuraesin, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas).
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Oktaviani, Rizky. 2015. Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion* (Survey pada UMKM Soreang-Bandung). Bandung.
- Paramita, M. P. & Budiasih, I. G. A. N. 2016. Pengaruh Sistem Pajak, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. (KPP) Pratama Badung Utara. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Priambodo. Putut. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Kab. Purworejo). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Priyatno, Dwi. 2016. Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS. Yogyakarta. Gava Media.

Pulungan, R. H. & Taufik, T. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Pekanbaru. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau.

Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sasmito, G. G. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim I dan II. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Siahaan. 2010. Hukum Pajak Formal. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfa Beta

Supramono & Theresia. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta. Andi Offset.

Undang-Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Waluyo. 2008. Akuntansi Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.

Wisangenei. Irwan. Dkk. 2017. Manajemen Perpajakan (Taati Pajak dengan Efisien). Jakarta. Mitra Wacana Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Validitas.

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.451**	.190	.707**	.156	.820**
	Sig. (2-tailed)		.000	.071	.000	.140	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X1.2	Pearson Correlation	.451**	1	.088	.406**	-.099	.614**
	Sig. (2-tailed)	.000		.407	.000	.351	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X1.3	Pearson Correlation	.190	.088	1	.164	.187	.459**
	Sig. (2-tailed)	.071	.407		.120	.075	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X1.4	Pearson Correlation	.707**	.406**	.164	1	.214*	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.120		.042	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X1.5	Pearson Correlation	.156	-.099	.187	.214*	1	.424**
	Sig. (2-tailed)	.140	.351	.075	.042		.000
	N	91	91	91	91	91	91
X1	Pearson Correlation	.820**	.614**	.459**	.823**	.424**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.355**	.366**	.128	.211*	.600**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.226	.044	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X2.2	Pearson Correlation	.355**	1	.761**	.290**	.390**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.005	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X2.3	Pearson Correlation	.366**	.761**	1	.297**	.336**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.004	.001	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X2.4	Pearson Correlation	.128	.290**	.297**	1	.298**	.543**
	Sig. (2-tailed)	.226	.005	.004		.004	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X2.5	Pearson Correlation	.211*	.390**	.336**	.298**	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.044	.000	.001	.004		.000
	N	91	91	91	91	91	91
X2	Pearson Correlation	.600**	.828**	.814**	.543**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.251*	.293**	.156	.355**	.611**
	Sig. (2-tailed)		.016	.005	.139	.001	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X3.2	Pearson Correlation	.251*	1	.576**	.028	.649**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.016		.000	.792	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X3.3	Pearson Correlation	.293**	.576**	1	.041	.613**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.700	.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X3.4	Pearson Correlation	.156	.028	.041	1	.305**	.416**
	Sig. (2-tailed)	.139	.792	.700		.003	.000
	N	91	91	91	91	91	91
X3.5	Pearson Correlation	.355**	.649**	.613**	.305**	1	.867**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.003		.000
	N	91	91	91	91	91	91
X3	Pearson Correlation	.611**	.752**	.746**	.416**	.867**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91	91

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.158	.351**	.159	.241*	.588**
	Sig. (2-tailed)		.134	.001	.133	.022	.000
	N	91	91	91	91	91	91
Y2	Pearson Correlation	.158	1	.080	.208*	.254*	.507**
	Sig. (2-tailed)	.134		.449	.048	.015	.000
	N	91	91	91	91	91	91
Y3	Pearson Correlation	.351**	.080	1	.196	.171	.529**
	Sig. (2-tailed)	.001	.449		.062	.106	.000
	N	91	91	91	91	91	91
Y4	Pearson Correlation	.159	.208*	.196	1	.672**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.133	.048	.062		.000	.000
	N	91	91	91	91	91	91
Y5	Pearson Correlation	.241*	.254*	.171	.672**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.022	.015	.106	.000		.000
	N	91	91	91	91	91	91
Y	Pearson Correlation	.588**	.507**	.529**	.745**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	91	91	91	91	91	91

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 2 Uji Reliabilitas.

• Variabel X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	91	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.754	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.15	.631	91
X1.2	4.14	.625	91
X1.3	4.12	.491	91
X1.4	4.19	.682	91
X1.5	4.23	.539	91
X1	20.84	1.916	91

• Variabel X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	91	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.18	.724	91
X2.2	4.22	.712	91
X2.3	4.23	.684	91
X2.4	4.16	.522	91
X2.5	4.18	.739	91
X2	20.99	2.359	91

- **Variabel X3**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	91	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	4.22	.696	91
X3.2	4.20	.703	91
X3.3	4.31	.645	91
X3.4	4.16	.582	91
X3.5	4.30	.723	91
X3	21.19	2.304	91

- **Variabel Y**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	91	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	91	100.0

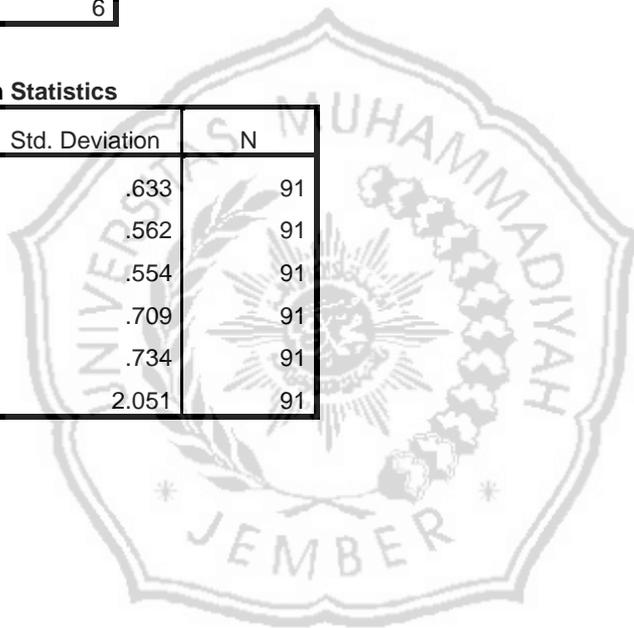
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	4.33	.633	91
Y2	4.20	.562	91
Y3	4.26	.554	91
Y4	4.25	.709	91
Y5	4.20	.734	91
Y	21.24	2.051	91



Lampiran 3 Uji regresi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845 ^a	.713	.703	1.117

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270.111	3	90.037	72.148	.000 ^b
	Residual	108.571	87	1.248		
	Total	378.681	90			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.076	1.541		.050	.961		
	X1	.422	.069	.394	6.123	.000	.795	1.257
	X2	.131	.056	.150	2.337	.022	.797	1.254
	X3	.455	.063	.511	7.226	.000	.660	1.516

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.982	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.009	21.462	.02	.25	.72	.00
	3	.006	25.771	.24	.02	.06	.88
	4	.004	33.077	.73	.73	.22	.12

a. Dependent Variable: Y

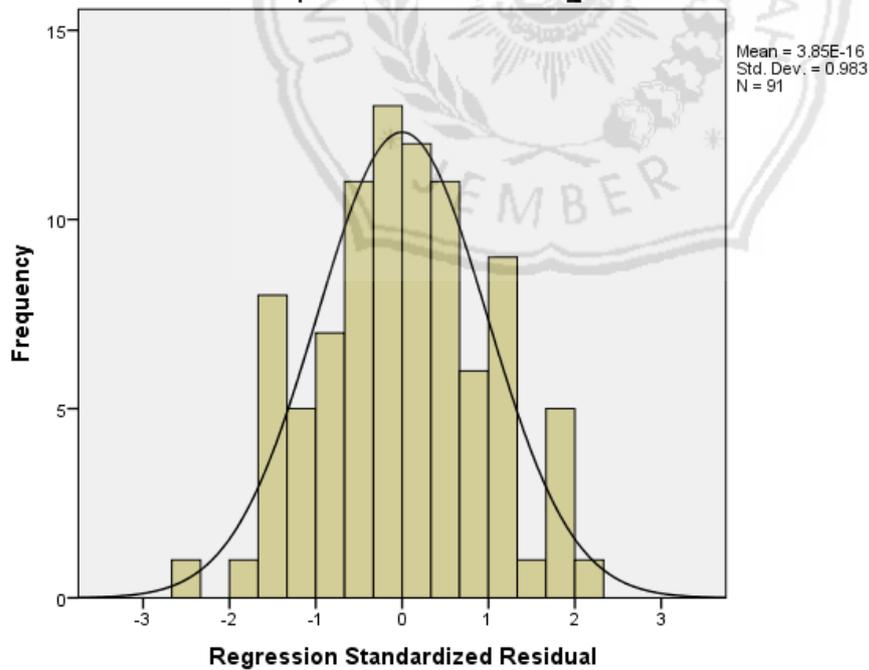
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	15.41	24.02	21.24	1.732	91
Residual	-2.892	2.521	.000	1.098	91
Std. Predicted Value	-3.365	1.603	.000	1.000	91
Std. Residual	-2.589	2.257	.000	.983	91

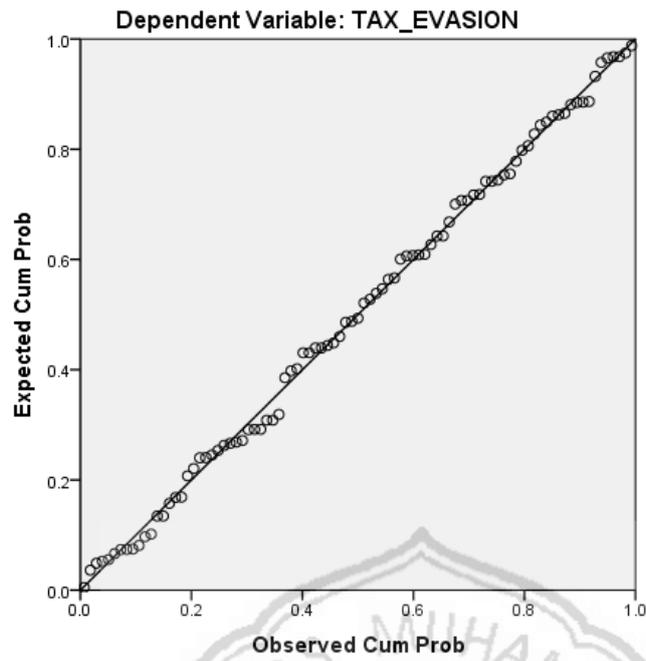
a. Dependent Variable: Y

Histogram

Dependent Variable: TAX_EVASION

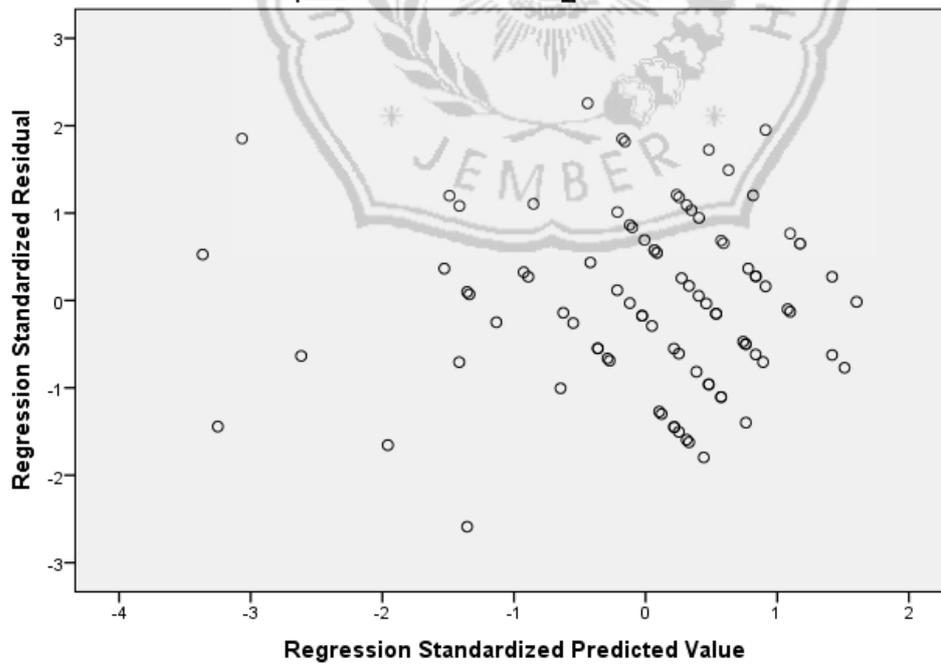


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: TAX_EVASION



Lampiran 4 r tabel dan t tabel

Tabel r product Moment (Sig = 0,05)							
df	R	df	R	df	r	df	R
1	0.9969	26	0.3739	51	0.2706	76	0.2227
2	0.9500	27	0.3673	52	0.2681	77	0.2213
3	0.8783	28	0.3610	53	0.2656	78	0.2199
4	0.8114	29	0.3550	54	0.2632	79	0.2165
5	0.7545	30	0.3494	55	0.2609	80	0.2162
6	0.7067	31	0.3440	56	0.2586	81	0.2159
7	0.6664	32	0.3388	57	0.2564	82	0.2146
8	0.6319	33	0.3388	58	0.2542	83	0.2133
9	0.6021	34	0.3291	59	0.2521	84	0.2120
10	0.5760	35	0.3246	60	0.2500	85	0.2108
11	0.5529	36	0.3202	61	0.2480	86	0.2096
12	0.5324	37	0.3160	62	0.2461	87	0.2084
13	0.5140	38	0.3120	63	0.2441	88	0.2072
14	0.4973	39	0.3081	64	0.2423	89	0.2061
15	0.4821	40	0.3044	65	0.2404	90	0.2050
16	0.4683	41	0.3008	66	0.2387	91	0.2039
17	0.4555	42	0.2973	67	0.2369	92	0.2028
18	0.4438	43	0.2940	68	0.2352	93	0.2017
19	0.4329	44	0.2907	69	0.2335	94	0.2006
20	0.4227	45	0.2876	70	0.2319	95	0.1996
21	0.4132	46	0.2845	71	0.2303	96	0.1986
22	0.4044	47	0.2816	72	0.2287	97	0.1975
23	0.3961	48	0.2787	73	0.2272	98	0.1966
24	0.3882	49	0.2759	74	0.2257	99	0.1956
25	0.3809	50	0.2732	75	0.2242	100	0.1946

Tabel Distribusi t			
Df	0,1	0,05	0,025
1	3.0777	6.3138	12.7062
2	1.8856	2.9200	4.3027
3	1.6377	2.3534	3.1824
4	1.5332	2.1318	2.7764
5	1.4759	2.0150	2.5706
6	1.4398	1.9432	2.4469
7	1.4149	1.8946	2.3646
8	1.3968	1.8595	2.3060
9	1.3830	1.8331	2.2622
10	1.3722	1.8125	2.2281
11	1.3634	1.7959	2.2010
12	1.3562	1.7823	2.1788
13	1.3502	1.7709	2.1604
14	1.3450	1.7613	2.1448
15	1.3406	1.7531	2.1314
16	1.3368	1.7459	2.1199
17	1.3334	1.7396	2.1098
18	1.3304	1.7341	2.1009
19	1.3277	1.7291	2.0930
20	1.3253	1.7247	2.0860
21	1.3232	1.7207	2.0796
22	1.3212	1.7171	2.0739
23	1.3195	1.7139	2.0687
24	1.3178	1.7109	2.0639
25	1.3163	1.7081	2.0595
26	1.3150	1.7056	2.0555
27	1.3137	1.7033	2.0518
28	1.3125	1.7011	2.0484
29	1.3114	1.6991	2.0452
30	1.3104	1.6973	2.0423
31	1.3095	1.6955	2.0395
32	1.3086	1.6939	2.0369
33	1.3077	1.6924	2.0345
34	1.3070	1.6909	2.0322
35	1.3062	1.6896	2.0301
36	1.3055	1.6883	2.0281
37	1.3049	1.6871	2.0262
38	1.3042	1.6860	2.0244
39	1.3036	1.6849	2.0227
40	1.3031	1.6839	2.0211
41	1.3025	1.6829	2.0195
42	1.3020	1.6820	2.0181
43	1.3016	1.6811	2.0167
44	1.3011	1.6802	2.0154
45	1.3006	1.6794	2.0141
46	1.3002	1.6787	2.0129
47	1.2998	1.6779	2.0117
48	1.2994	1.6772	2.0106
49	1.2991	1.6766	2.0096
50	1.2987	1.6759	2.0086
51	1.2984	1.6753	2.0076
52	1.2980	1.6747	2.0066
53	1.2977	1.6741	2.0057

54	1.2974	1.6736	2.0049
55	1.2971	1.6730	2.0040
56	1.2969	1.6725	2.0032
57	1.2966	1.6720	2.0025
58	1.2963	1.6716	2.0017
59	1.2961	1.6711	2.0010
60	1.2958	1.6706	2.0003
61	1.2956	1.6702	1.9996
62	1.2954	1.6698	1.9990
63	1.2951	1.6694	1.9983
64	1.2949	1.6690	1.9977
65	1.2947	1.6686	1.9971
66	1.2945	1.6683	1.9966
67	1.2943	1.6679	1.9960
68	1.2941	1.6676	1.9955
69	1.2939	1.6672	1.9949
70	1.2938	1.6669	1.9944
71	1.2936	1.6666	1.9939
72	1.2934	1.6663	1.9935
73	1.2933	1.6660	1.9930
74	1.2931	1.6657	1.9925
75	1.2929	1.6654	1.9921
76	1.2928	1.6652	1.9917
77	1.2926	1.6649	1.9913
78	1.2925	1.6646	1.9908
79	1.2924	1.6644	1.9905
80	1.2922	1.6641	1.9901
81	1.2921	1.6639	1.9897
82	1.2920	1.6636	1.9893
83	1.2918	1.6634	1.9890
84	1.2917	1.6632	1.9886
85	1.2916	1.6630	1.9883
86	1.2915	1.6628	1.9879
87	1.2914	1.6626	1.9876
88	1.2912	1.6624	1.9873
89	1.2911	1.6622	1.987
90	1.291	1.6623	1.9867
91	1.2909	1.6618	1.9864
92	1.2908	1.6616	1.9861
93	1.2907	1.6614	1.9858
94	1.2906	1.6612	1.9855
95	1.2905	1.6611	1.9853
96	1.2904	1.6609	1.985
97	1.2903	1.6607	1.9847
98	1.2902	1.6606	1.9845
99	1.2902	1.6604	1.9842
100	1.2901	1.6602	1.984

Lampiran 5 Kuesioner Penelitian

1. Deskriptif Responden

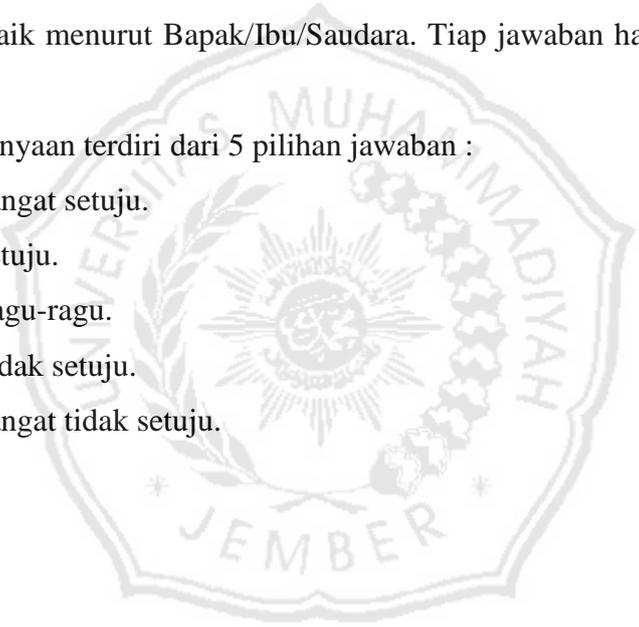
Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Tinggal :

2. Pernyataan Penelitian

Berilah tanda (√) untuk masing-masing pertanyaan kuosioner yang merupakan pilihan terbaik menurut Bapak/Ibu/Saudara. Tiap jawaban hanya boleh ada satu jawaban.

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

SS = Sangat setuju.
S = Setuju.
R = Ragu-ragu.
TS = Tidak setuju.
STS = Sangat tidak setuju.



3. Sistem Perpajakan.

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Memahami tata cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan Undang-undang.					
2	Melaporkan sendiri SPT sebagai wujud dukungan terhadap kemandirian pajak.					
3	Mendapatkan bantuan dalam melakukan pelaporan pajak dari fiskus.					
4	Mendapatkan kemudahan dalam melakukan pelaporan pajak.					
5	Sosialisasi dari instansi perpajakan membantu memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT					

4. Tarif Pajak.

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Tarif yang dikenakan sebanding dengan penghasilan wajib pajak.					
2	Meyakini bahwa adanya prinsip keadilan dalam penentuan besarnya tarif pajak.					
3	Kesadaran untuk membayarkan pajak dengan tarif yang telah ditentukan.					
4	Percaya bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan undang-undang.					
5	Membayarkan pajak sesuai dengan tarif dan pembebanan yang telah dihitung.					

5. Pemeriksaan Pajak.

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.					
2	Kemudahan akses bukti yang diberikan oleh wajib pajak.					

3	Pemeriksaan berguna untuk meningkatkan kemandirian dan meminimalkan kecurangan					
4	Pemeriksa memiliki pengalaman dan keandalan dalam hal pemeriksaan.					
5	Kesadaran dari wajib pajak untuk memberikan keterangan dan bukti yang semestinya.					

6. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Tidak menyampaikan SPT merupakan salah satu upaya tindakan <i>tax evasion</i>					
2	Tidak mengisi SPT dengan benar merupakan salah satu upaya tindakan <i>tax evasion</i>					
3	Tidak menyetorkan pajak yang seharusnya di bayarkan merupakan salah satu upaya tindakan <i>tax evasion</i>					
4	Mencoba untuk melakukan suap kepada fiskus merupakan salah satu upaya tindakan <i>tax evasion</i>					
5	Melakukan perubahan terhadap laporan keuangan merupakan salah satu upaya tindakan <i>tax evasion</i>					

Sumber :

Fauzi & Mirza. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Malang. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan .Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mustofa, F. A. (2016).Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak danAsas Keadilan terhadapKepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).Jurusan Administrasi Bisnis, Fakutas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Lampiran 6 Rekapitulasi Kuesioner

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
1	5	4	4	5	4	22	4	5	5	4	4	22	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
2	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	5	22	4	5	5	4	5	23	5	4	4	5	5	23
3	5	4	4	5	5	23	4	3	3	4	4	18	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	4	21	3	4	4	4	5	20	4	3	3	4	3	17	5	4	4	3	3	19
5	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19
6	5	5	4	5	4	23	5	3	3	4	4	19	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	4	22
7	4	4	4	4	4	20	4	3	3	3	3	16	5	3	3	4	3	18	4	4	4	3	3	18
8	5	5	4	5	3	22	2	3	3	3	4	15	4	3	3	3	3	16	5	4	4	3	3	19
9	3	3	4	3	3	16	3	3	3	4	4	17	2	3	3	3	3	14	3	4	3	3	3	16
10	3	3	3	3	4	16	5	4	4	4	5	22	3	2	2	4	2	13	3	3	4	2	2	14
11	5	4	4	5	4	22	5	5	5	4	4	23	5	4	4	4	4	21	4	4	5	4	4	21
12	5	5	4	5	4	23	4	5	5	4	5	23	5	5	5	4	5	24	5	4	5	5	5	24
13	4	5	5	4	4	22	5	5	5	4	4	23	4	5	5	4	5	23	5	5	5	5	5	25
14	5	5	4	5	4	23	4	5	5	4	5	23	5	5	5	4	5	24	5	4	4	5	5	23
15	3	3	3	3	4	16	5	5	5	4	4	23	4	5	5	4	5	23	3	3	4	5	5	20
16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21	5	5	5	4	5	24	4	4	4	5	5	22
17	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	5	23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
18	5	5	4	5	4	23	3	5	5	5	4	22	4	5	5	4	5	23	5	4	4	5	5	23
19	3	3	4	3	5	18	4	4	4	4	4	20	3	5	5	5	5	23	3	4	3	5	5	20
20	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21	5	5	5	4	5	24	4	4	4	5	5	22
22	4	5	4	4	4	21	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
23	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	3	20	5	5	5	4	5	24	4	4	4	5	5	22
24	4	3	4	4	4	19	3	4	4	4	4	19	5	4	4	4	4	21	3	4	4	4	4	19
25	5	5	5	5	5	25	3	4	4	4	4	19	4	5	5	5	5	24	5	5	4	5	5	24
26	3	4	4	3	4	18	3	4	4	4	3	18	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
28	4	4	3	4	4	19	5	3	4	4	3	19	3	3	3	4	3	16	4	3	3	3	3	16
29	5	5	4	5	4	23	4	4	4	4	2	18	5	4	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
30	3	4	4	3	4	18	4	5	5	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21	4	5	5	4	5	23	4	4	4	5	5	22
32	4	5	5	4	4	22	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
33	4	5	5	4	4	22	4	4	4	5	5	22	5	5	5	4	5	24	5	5	4	5	5	24
34	4	4	4	4	5	21	5	5	5	4	5	24	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
35	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	5	21	5	5	5	4	5	24	4	5	4	5	5	23
36	3	3	4	3	4	17	5	5	5	4	4	23	3	4	4	4	4	19	3	4	4	4	4	19
37	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24	4	4	5	5	5	23
38	4	4	5	4	5	22	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	5	25	4	5	4	5	5	23
39	3	3	4	3	4	17	3	5	5	5	3	23	3	4	4	4	4	19	4	4	4	2	2	16
40	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	24	5	5	5	4	5	24	5	4	4	4	4	21
41	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	5	21	5	4	4	5	5	23	5	4	5	4	4	22
42	5	4	4	4	4	21	4	5	5	4	4	22	4	5	4	5	4	22	4	4	4	5	5	22
43	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	4	22	4	4	4	5	5	22	5	4	5	4	4	22
44	5	4	4	4	4	21	4	4	4	5	5	22	5	4	4	4	4	21	4	5	5	4	4	22
45	4	4	3	4	5	20	4	4	4	5	5	22	5	4	4	4	5	22	4	5	4	5	4	22

46	4	4	4	5	4	21	5	5	4	4	4	22	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20
47	4	5	4	5	3	21	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	5	23	4	4	4	5	3	20
48	4	5	4	4	5	22	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	3	19	5	5	4	4	5	23
49	4	4	5	5	5	23	5	5	4	4	4	22	4	4	5	4	5	22	5	4	5	5	5	24
50	4	4	4	5	5	22	4	5	4	4	5	22	5	4	5	5	4	23	4	5	4	4	5	22
51	5	4	4	5	5	23	4	4	4	4	5	21	4	3	5	5	3	20	4	5	4	4	3	20
52	4	4	4	5	5	22	4	5	4	4	5	22	4	5	5	5	5	24	4	5	4	5	5	23
53	4	5	3	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	5	5	2	3	19	4	4	4	4	5	21
54	5	5	4	4	4	22	4	4	5	5	4	22	4	4	5	4	4	21	4	5	5	5	4	23
55	4	4	4	3	4	19	5	4	4	5	4	22	5	4	3	5	4	21	5	3	5	4	4	21
56	4	4	4	4	4	20	4	5	4	5	4	22	5	4	4	5	5	23	5	4	4	5	5	23
57	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	4	23	4	4	4	4	3	19	5	4	4	3	4	20
58	4	4	5	4	4	21	5	5	5	5	4	24	5	4	4	4	5	22	4	4	4	5	4	21
59	4	4	5	4	4	21	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	4	22
60	4	4	5	4	5	22	5	4	5	4	5	23	5	5	5	4	5	24	5	5	5	4	5	24
61	4	2	5	5	5	21	4	3	4	4	4	19	5	5	4	4	4	22	4	5	4	4	3	20
62	5	4	4	5	5	23	5	4	5	4	5	23	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	4	24
63	4	5	4	5	4	22	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	5	23
64	4	4	5	5	4	22	3	4	5	5	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21
65	4	4	5	4	4	21	4	5	4	4	4	21	4	4	5	4	5	22	4	4	5	5	5	23
66	5	4	5	4	4	22	4	4	4	5	5	22	4	4	5	5	5	23	5	5	4	5	4	23
67	5	4	5	4	5	23	4	4	5	4	4	21	4	4	5	4	5	22	5	4	4	5	4	22
68	5	4	5	4	5	23	4	4	4	3	3	18	5	2	4	4	4	19	4	3	5	4	4	20
69	4	5	4	5	5	23	5	5	5	4	4	23	5	4	4	5	4	22	5	4	5	4	4	22
70	4	4	4	5	5	22	5	4	5	5	4	23	4	5	4	5	5	23	4	4	5	5	5	23
71	4	4	4	5	4	21	5	5	5	4	5	24	4	4	5	5	4	22	5	5	5	4	5	24
72	5	4	4	5	4	22	4	5	4	5	5	23	5	4	5	5	5	24	5	5	4	5	5	24
73	4	5	4	4	5	22	4	4	4	5	5	22	5	5	5	3	4	22	4	5	4	4	4	21
74	4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	5	23	4	4	4	5	4	21	4	5	5	4	4	22
75	4	4	4	5	5	22	5	4	5	4	4	22	4	4	4	5	5	22	5	4	5	5	4	23
76	4	4	4	3	4	19	5	4	4	4	5	22	4	4	4	5	5	22	5	4	5	5	4	23
77	5	4	4	4	5	22	4	4	4	5	5	22	4	4	4	3	4	19	5	4	4	4	5	22
78	4	4	4	5	5	22	4	4	5	4	4	21	4	5	4	5	5	23	5	3	5	5	4	22
79	4	4	4	4	5	21	4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	21	4	5	5	4	4	22
80	4	4	5	4	5	22	4	4	5	4	5	22	4	5	4	4	5	22	4	4	4	5	4	21
81	5	4	4	5	4	22	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
82	4	5	4	4	4	21	4	5	5	4	5	23	4	4	5	4	5	22	4	4	5	5	5	23
83	5	4	4	5	5	23	4	4	4	5	4	21	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
84	4	5	4	4	4	21	4	3	3	4	3	17	4	5	5	4	5	23	4	4	4	4	5	21
85	3	4	4	3	4	18	3	4	4	4	4	19	3	4	4	4	4	19	4	5	3	4	4	20
86	5	5	4	5	4	23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21	5	4	5	4	4	22
87	4	4	4	4	4	20	5	3	3	4	3	18	5	4	5	4	4	22	4	5	4	4	4	21
88	5	5	4	5	3	22	4	3	3	3	3	16	4	5	5	3	5	22	5	4	4	3	4	20
89	3	3	4	3	3	16	2	3	3	3	3	14	2	4	4	3	3	16	3	4	4	3	4	18
90	3	3	3	3	4	16	3	2	2	4	2	13	4	2	5	4	3	18	3	3	4	4	2	16
91	5	4	4	5	4	22	5	4	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21	5	5	5	4	4	23